



Analisis Sistem Penanggulangan Kebakaran Di Upt Pemadam Kebakaran Tipe A Kota Dumai Tahun 2023

Analysis Of Fire Countermeasures System In Technical Implementation Unit Of Type A Fire Fighting Dumai City In 2023

Fitria Rahmadany¹, Welly Sando²
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

e-mail : fitria.dmi18@gmail.com¹, welly.agir81@gmail.com²

Histori artikel	Abstrak Abstract
Received: 02-12-2023 Accepted: 16-12-2023 Published: 21-12-2023	Kebakaran merupakan kejadian yang mengakibatkan kerugian berupa nyawa atau harta benda serta dapat terjadi dimana saja, untuk itu diperlukan sistem penanggulangan kebakaran yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem penanggulangan kebakaran di unit pelaksana teknis pemadam kebakaran tipe A Kota Dumai tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai pada bulan Mei hingga Juni 2023. Informan kunci yaitu kepala sub bagian tata usaha pemadam kebakaran, Informan utama yaitu kepala unit pelaksana teknis pemadam kebakaran, Informan pendukung terdiri dari 3 orang petugas pemadam kebakaran. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya manusia di unit pelaksana teknis pemadam kebakaran Kota Dumai belum memadai, begitupun dengan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran belum lengkap, standar operasional prosedur di unit pelaksanaan teknis pemadam kebakaran ada tetapi tidak ditempelkan, sistem pemadaman yang di lakukan unit pelaksana teknis pemadam kebakaran Kota Dumai belum maksimal, dan sistem penyelamatan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis pemadam kebakaran juga belum maksimal. Disarankan kepada unit pelaksana teknis pemadam kebakaran tipe A Kota Dumai agar melakukan perekrutan sumber daya manusia berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.16/PTR/M/2009 serta pengadaan sarana dan prasarana baru diharapkan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.122/PTR/M/2018. kata kunci : SDM, Sarana dan Prasarana, SOP, Sistem Pemadaman, Sistem Penyelamatan <i>Fire is an incident that results in loss of life or property and can occur anywhere, for this reason a fire suppression system is needed which is an effort to prevent fires from occurring. The purpose of this study was to find out the fire prevention system in the technical implementation unit for type A firefighters in Dumai City in 2023. This study used a descriptive research methodology with a qualitative approach conducted at the Dumai City Fire Department UPT from May to June 2023. The key informant was the head of sub fire department administration section, the main informant is the head of the fire department technical implementation unit, supporting informants consist of 3 firefighters. Data collection techniques using interviews and observation. Processing data using data triangulation method. The results of the study found that the human resources in the Dumai City fire fighting technical implementation unit were inadequate, as well as the fire fighting facilities and infrastructure were incomplete, standard operating procedures in the fire fighting technical implementation unit existed but were not attached, the extinguishing system was carried out by the technical implementing unit the Dumai City fire department has not been maximized, and the rescue system carried out by the fire department's technical implementation unit has also not been maximized. It is suggested to the Dumai City type A fire fighting technical implementation unit to recruit human resources based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No.16/PTR/M/2009 and the procurement of new facilities and infrastructure is expected to be guided by the Regulation of the Minister of Home Affairs No.122/PTR /M/ 2018.</i> Keywords : Human Resources, Facilities and Infrastructure, SOP, Extinguishment Systems, Rescue Systems

PENDAHULUAN

Data dari International Association Of Fire And Rescue Services atau yang dikenal dengan Fire Statistics Center of CTIF (CFS CTIF) menunjukkan bahwa peristiwa kebakaran banyak terjadi di negara maju, statistik tahun 2020 memuat data dari 48 negara, mewakili 1/6 dari seluruh negara di dunia sebanyak 4.007.811 peristiwa kebakaran terjadi. Di negara-negara ini, rata-rata ada 55 juta panggilan layanan kebakaran dan 4 juta kebakaran, di mana sekitar 31 ribu orang meninggal dan sekitar 62 ribu orang terluka. Kematian dan cedera juga terjadi pada petugas pemadam kebakaran di 33 negara. Pada tahun 2020, 89 petugas pemadam kebakaran tewas, dan 68.655 terluka di 48 negara tersebut (Brushlinsky dkk., 2022).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 menyebutkan terdapat jumlah penduduk sebanyak 275.773.800 jiwa. Terjadi penambahan penduduk sebesar 1,13% jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, sehingga bertambah areal pemukiman, pembangunan perumahan dan gedung-gedung baru di perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2022) Keadaan ini membuat Indonesia tidak luput dari bermacam berbagai permasalahan antara lain kebakaran. CNN melaporkan bahwa sebanyak 17.768 peristiwa kebakaran terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021, dengan 5.274 peristiwa atau sekitar 45% diantaranya diakibatkan oleh arus pendek aliran listrik (CNN Indonesia, 2022).

Provinsi Riau merupakan salah satu dari 38 provinsi yang menghadapi permasalahan kebakaran tiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Pekanbaru, kejadian kebakaran di kota pekanbaru sepanjang tahun 2022 sebanyak 166 kejadian kebakaran yang sebagian besar disebabkan hubungan arus pendek dan kelalaian individu semacam merokok tidak pada tempatnya, membuang puntung rokok berapi dalam tempat sampah, kecerobohan pemakaian perlengkapan listrik, membiarkan saluran elpiji (LPG) bocor. (DPKP Pekanbaru, 2022).

Menurut Penelitian Muhammad Baariq Yazid pada tahun 2022 mengenai Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Menanggulangi Dan Pencegahan Kebakaran Bangunan Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas pemadam kebakaran serta penyelamatan dalam mengatasi serta mencegah kebakaran di Kota Pekanbaru, serta memperoleh hasil bahwa para satgas DPKP Kota Pekanbaru dalam mengatasi kebakaran bangunan telah cocok dengan respond time yang sudah ditetapkan selain itu jarak yang jauh serta keterbatasan satuan tugas (satgas) beserta alat-alat pendukung buat mengatasi kebakaran bangunan masih kurang diatas dari respond time (Baariq Yazid, 2022).

Informasi didapatkan peneliti di UPT Damkar Tipe A Kota Dumai bahwa UPT Damkar merupakan satu-satunya unit yang memberikan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubag TU UPT Damkar Kota Dumai, mengenai ketersediaan sumber daya manusia di UPT Pemadam Kebakaran masih kurang dari segi jumlah dan kualifikasi, menurut Permendagri No.114 tahun 2018 setiap 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dioperasikan oleh 6 petugas damkar dengan pembagian tugas 1 orang sebagai Komandan Regu, 1 orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur, sedangkan di UPT Damkar Kota Dumai 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dioperasikan oleh 3 petugas damkar, dan kualifikasi petugas damkar yang dimiliki UPT hanya pemadam 1 dan pemadam 2 hal ini tentu belum sesuai dengan Permendagri No.16 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil observasi survey awal, mengenai kondisi sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada di UPT tidak layak dan jauh dari standar yang telah ditetapkan dan bahkan tidak ada sarana pendukung sama sekali untuk beberapa kebutuhan penyelamatan di lapangan seperti tidak tersedianya mobil tangga untuk penyelamatan korban di gedung bertingkat, dimana dalam pelaksanaan tugas dengan kondisi seperti ini dapat meningkatkan resiko jatuhnya korban, khususnya korban dari petugas pemadam kebakaran yang berdampak pada terlaksananya penanganan keadaan darurat (kebakaran dan penyelamatan) tidak optimal sehingga resiko jatuhnya korban dari masyarakat dan kerugian material semakin besar. Selain itu fenomena kejadian kebakaran dan penyelamatan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah dan jenis kejadiannya, khususnya kejadian penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan keselamatan manusia.

TUJUAN

Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem penanggulangan kebakaran di UPT Pemadam Kebakaran Tipe A Kota Dumai Tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai pada bulan Mei hingga Juni 2023. Informan utama terdiri dari 5 orang, informan kunci yaitu kepala sub bagian tata usaha pemadam kebakaran, informan utama yaitu kepala UPT pemadam kebakaran, dan informan pendukung terdiri dari 3 orang petugas pemadam kebakaran. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode triangulasi data.

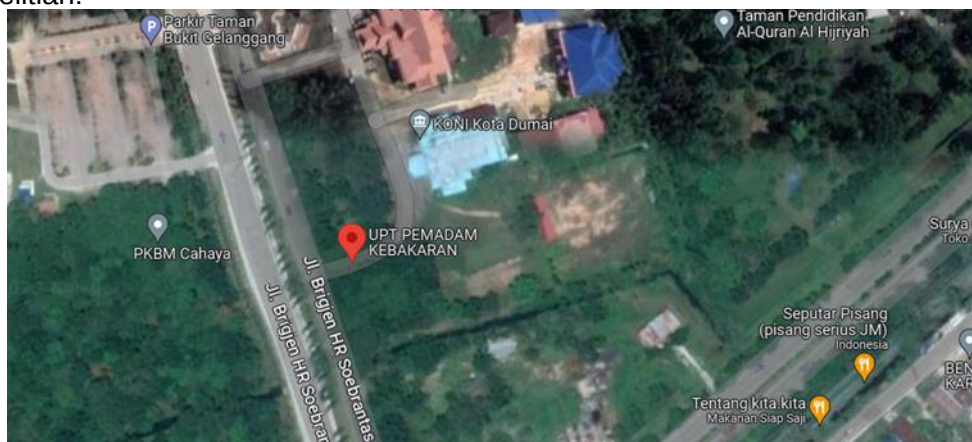
HASIL

Informan pada penelitian ini terdiri dari:

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Kode Informan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja
1	IK	Pria	43	S1	17 Tahun
2	IU	Pria	44	S2	1 Tahun
3	IP 1	Pria	53	SMA	12 Tahun
4	IP 2	Pria	45	SMA	17 Tahun
5	IP 3	Pria	50	SMA	5 Tahun

Lokasi Penelitian:



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

PEMBAHASAN

1. SDM Personil Pemadam Kebakaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah personil pemadam kebakaran di UPT Damkar Kota Dumai belum memadai. Berdasarkan hasil observasi telaah dokumen menunjukkan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009. Di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai belum semua petugas mengikuti diklat pemadam kebakaran, hal ini tentu belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, penggolongan jenis standar kualifikasi aparaturnya disesuaikan dengan jenis jabatan pemadam kebakaran yang terdiri dari pemadam 1, pemadam 2, pemadam 3, Inspektur Muda Kebakaran, Inspektur Madya Kebakaran, Inspektur Utama Kebakaran, Penyuluh Muda Kebakaran, Penyuluh Madya Kebakaran, Investigator Muda Kebakaran, Investigator Madya Kebakaran, Instruktur Muda Kebakaran, Instruktur Madya Kebakaran, Operator Mobil Kebakaran, Montir Mobil Kebakaran, Caraka Mobil Kebakaran, Operator Komunikasi Kebakaran.

Menurut Susanto dalam Pakpahan (2014) bahwa aset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah sumber daya manusia. Manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan dan melakukan inovasi dalam mencapai tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi (Pakpahan, 2014).

Menurut Basnawi dalam (S et al., 2020) sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat berperan dalam menjamin keberlangsungan suatu organisasi. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), suatu sistem melaksanakan fungsifungsi atau kewenangannya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasilhasil (outcomes) (S dkk., 2020).

Menurut hasil penelitian Zainal (2015), peranan SDM sangat menentukan terwujudnya tujuan perusahaan, karena untuk mengatur manusia tidak mudah maka perlu diatur dengan teori-teori manajemen yang memfokuskan mengenai pengaturan manusia (karyawan) dalam mewujudkan tujuan perusahaan/organisasi (Veithzal Rivai Zainal, 2015)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wayan Krisna Eka Putra dan Gede Putu Banu Astawa (2022) mengenai pemetaan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah SDM Dinas Pemadam Kebakaran masih dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan cara melibatkan pihak desa sebagai tim relawan yang ikut membantu dalam penanganan kejadian kebakaran (Krisna dkk., 2022).

Berdasarkan pendapat peneliti pada UPT Damkar Kota Dumai Sumber Daya Manusia di UPT Damkar, sebagian sudah mengikuti pelatihan pemadam kebakaran, kualifikasi aparatur pemadam kebakaran yang dimiliki UPT pemadam kebakaran Kota Dumai hanya pemadam 1 dan pemadam 2. Jika dilihat dari jumlah dan kualifikasi SDM yang tersedia, maka tidak sebanding dengan beban tugas UPT yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. Dilihat dari jumlah SDM yang dimiliki sangat minim, namun pada beberapa kompetensi yang sangat dibutuhkan justru terjadi kekurangan. Luasnya lingkup pekerjaan Pemadam kebakaran dan penyelamatan menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus.

2. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran

Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor penentu dalam keberhasilan penanggulangan bencana kebakaran. Kurangnya sarana dan prasarana dapat menjadi penghambat UPT Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi bencana kebakaran. Berdasarkan hasil wawancara sarana dan prasarana di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai, saat ini masih belum memadai sementara untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana kebakaran perlu didukung dengan ketersediaan berbagai sarana prasarana. Berdasarkan hasil observasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang

dimiliki UPT Pemadam Kebakaran terbatas dari segi jumlah dan kualitas seperti ketersediaan kendaraan dinas/operasional dan kendaraan lapangan yang masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai, jumlah keseluruhan kendaraan yang dimiliki damkar yaitu 10 buah, antara lain 5 buah Pump Truk (Mobil Pompa), 1 buah Mobil Rescue, 2 buah Mobil Water Suplay, dan 2 buah Mobil Komando. Untuk mobil rescue yang dimiliki UPT masih belum sesuai sebagaimana spesifikasi teknis mobil rescue yang dilengkapi dengan perahu, tenda, snorkel, tool box, jas hujan, kotak P3K, tali penarik kendaraan, APAR, alat komunikasi, dan lampu sorot. Sedangkan mobil rescue yang di miliki UPT berupa fire jeep/mobil komando. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi juga belum memadai sehingga akselerasi pelayanan di UPT Pemadam Kebakaran belum berjalan optimal. Selain itu tidak tersedianya prasarana pendukung seperti posko-posko pemadam kebakaran di 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut karena terbatasnya dana pendukung. Terkait pemadaman kebakaran hotel tinggi atau gedung tinggi belum bisa ditangani secara maksimal, karena sarannya tidak ada, contohnya seperti mobil tangga. Meskipun sudah diusulkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan UPT Pemadam Kebakaran kepada walikota dumai, namun hal tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala pada anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wayan Krisna Eka Putra dan Gede Putu Banu Astawa (2022) mengenai pemetaan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, maka dapat diambil kesimpulan bahwa minimnya ketersediaan sarana dan prasarana khususnya armada yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Selain itu kondisi armada pun sudah sebegini berumur sehingga kinerja dalam hal penanganan kurang maksimal. Begitu juga ketersediaan hidran masih sangat minim hanya tersedia di pusat kecamatan bahkan sebagian kondisinya sudah tidak layak pakai (Krisna dkk., 2022).

Berdasarkan pendapat peneliti seharusnya, UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai meningkatkan alokasi pada anggaran pemadam kebakaran agar dapat menambah jenis armada yang ada di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara SOP di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai, standar operasional prosedur ada dan semua pekerja sudah mentaati sesuai dengan prosedurnya. Berdasarkan hasil observasi telaah dokumen SOP yang ada yaitu SOP Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (selain Kebakaran), SOP Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (Kebakaran), SOP Operasi Pemadam Kebakaran, SOP Pengisian BBM, SOP Pengisian BBM Dalam Keadaan Operasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya, SOP Relawan Kebakaran Dalam Operasi Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh Zahara (2022), jika dilihat secara parsial variabel SOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Maka dapat diartikan bahwa apabila SOP meningkat maka akan meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat (Zahara Raudia, 2022).

Program dapat juga berupa aturan dan prosedur kerja yang berlaku di tempat kerja. Ramli (2010) dalam Karina 2013 mengatakan bahwa peraturan merupakan suatu hal yang mengikat dan telah disepakati, sedangkan prosedur merupakan rangkaian dari suatu tata kerja yang berurutan, tahap demi tahap serta jelas menunjuk-kan jalan atau arus (flow) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan dimulai. Tujuan dari dibentuknya peraturan dan prosedur keselamatan kerja yaitu untuk mengendalikan bahaya yang ada di tempat kerja, untuk melindungi pekerja dari kemungkinan terjadi kecelakaan, dan untuk mengatur perilaku pekerja, sehingga nantinya tercipta budaya keselamatan yang baik (Fatmawaty dkk., 2017)

Berdasarkan hasil observasi pada UPT Damkar semua pekerja menaati sesuai dengan prosedur pada UPT Damkar. SOP yang diterapkan pada UPT Damkar yaitu SOP Operasi Penyalamatan dan Evakuasi (selain Kebakaran), SOP Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (Kebakaran), SOP Operasi Pemadam Kebakaran, SOP Pengisian BBM, SOP Pengisian BBM Dalam Keadaan Operasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya, SOP Relawan Kebakaran Dalam Operasi Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan pendapat peneliti, seharusnya UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai harus meningkatkan kondisi lingkungan disekitar dengan memperbanyak rambu-rambu K3 sebagai simbol peringatan tanda bahaya dan memasang Standar Operasional Prosedur di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai dilihat dari observasi para pekerja mematuhi peraturan yang ada dilapangan dan menggunakan APD sesuai dengan pekerjaan nya.

4. Sistem Pemadaman

Sistem pemadaman digunakan untuk memadamkan atau mencegah penyebaran api di sebuah bangunan atau kendaraan, sistem pemadaman menggunakan kombinasi bahan kimia kering (ABC Powder), aerosol, gas dan/atau agen basah untuk memadamkan kebakaran peralatan. Berdasarkan hasil penelitian Sistem Pemadaman di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemadaman di UPT Damkar sesuai dengan prosedurnya, teknik/metode yang digunakan yaitu cooling, smothering, starvation, dan breakchain reaction. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, menjelaskan tugas pokok penanggulangan kebakaran, salah satunya ialah pemadaman kebakaran, penerapan standar operasional pemadaman yang telah disusun dan disimulasikan sesuai dengan strategi dan taktik

yang harus digunakan, menjalankan fungsi-fungsi pendukung, fungsi pelaksanaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat atau satuan relawan kebakaran yang telah dibentuk, dan pelaksanaan tugas bantuan pemadam kebakaran sesuai dengan permintaan dari daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmat Hidayat (2017) mengenai evaluasi pelaksanaan tugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih lambannya dalam penanggulangan kebakaran hal ini dirasakan masih lamanya waktu yang ditempuh pegawai pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran, seharusnya waktu tanggap 5 - 15 menit tiba dilokasi kebakaran. Hal ini dikarenakan pos pemadam kebakaran jauh dari lokasi kejadian dan pemadam kebakaran cenderung mengisi tengki terlebih dahulu baru berangkat sehingga dinilai lamban dan tidak professional pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya (Hidayat, 2017).

Peneliti mendapatkan hasil wawancara pada personil pemadam kebakaran di UPT Damkar bahwa dalam operasi pemadaman personil menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tetapi yang menjadi hambatan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dari pemadam kebakaran yang terlebih dahulu memproteksi objek yang belum terbakar bertujuan agar api tidak menjalar lebih luas yang menyebabkan kerugian lebih besar. Hambatan lainnya yaitu sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siti Muthmainnah (2019) pada proses pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran mengalami beberapa kendala diantaranya adalah terkendalanya mobilitas petugas pemadam kebakaran yang diakibatkan beberapa lokasi tidak terkendalnya kepadatan lalu lintas, bencana kebakaran bahkan menjadi tontonan bagi masyarakat dan tidak memberikan akses jalan kepada mobil pemadam kebakaran. Kendala yang paling utamanya adalah parkir bebas kendaraan masyarakat yang ingin membantu proses pemadaman api atau hanya menjadi penonton bencana (Muthmainnah, 2021).

Berdasarkan pendapat peneliti bahwa UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta visi dan misi UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai agar masyarakat tahu akan tugas pemadam kebakaran.

5. Sistem Penyelamatan

Berdasarkan hasil penelitian Sistem Penyelamatan di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelamatan di UPT Damkar sesuai dengan prosedurnya. Menurut penelitian Prima Widayanto (2016) tentang analisis kinerja tim pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan kejadian kebakaran di dinas kebakaran Kota Semarang, kegiatan dari penyelamatan (rescue) dan evakuasi yaitu membina dan mengkoordinasikan operasional dengan satuan terkait dalam operasi penyelamatan, mengadakan usaha-usaha penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran baik jiwa maupun benda, menyiapkan

tempat berhimpun bagi korban, memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan sebelum dirujuk ke rumah sakit, dan mengadakan pengawasan, penilaian, dan pencatatan terhadap korban (Widayanto, 2016)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad Rifqi Wahyudi (2022) mengenai manajemen penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah, sistem penyelamatan dan evakuasi yang dilakukan setelah pemadaman adalah melakukan koordinasi dengan dinas Kesehatan yang mana juga merupakan komando tanggap darurat bencana, bekerjasama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan, dan juga ini ditujukan kepada para petugas pemadam kebakaran yang mana apabila dalam menjalankan tugasnya terjadi sesuatu hal seperti luka ataupun sakit pada saat bertugas (Wahyudi, 2022).

Peneliti mendapatkan hasil dari wawancara di UPT Damkar bahwa dalam tugas penyelamatan personil menjalankan tugas semaksimal mungkin menyelamatkan korban dalam kejadian kebakaran, tetapi yang menjadi hambatan yaitu tidak adanya APD baju tahan api yang digunakan untuk masuk menerobos kebakaran dengan tujuan untuk menyelamatkan korban yang terjebak di dalam bangunan, selain itu dalam sistem penyelamatan seharusnya armada berangkat ke lokasi kejadian kebakaran bersamaan dengan sahabat ambulans (tim medis) tetapi pada UPT Pemadam Kebakaran tidak ada ambulans yang tersedia, jadi jika ada korban baru danru (komandan regu) menghubungi ambulans untuk membantu memberi pertolongan kepada korban kebakaran.

Berdasarkan pendapat peneliti bahwa UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai harus memiliki tenaga rescue tersendiri melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Sistem Penanggulangan Kebakaran di UPT Pemadam Kebakaran Tipe A Kota Dumai Tahun 2023 dapat disimpulkan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

SDM Personil Pemadam Kebakaran yang di miliki UPT Pemadam Kebakaran masih kurang dimana seharusnya 1 unit mobil damkar dioperasikan oleh 6 orang petugas, sedangkan di UPT 1 unit mobil damkar dioperasikan hanya 3 orang petugas, dan mengenai kualifikasi petugas yang dimiliki hanya pemadam 1 dan 2 hal ini belum sesuai dengan Permendagri No.16 Tahun 2009.

Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran saat ini di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai masih kurang memadai sementara untuk. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut karena terbatasnya dana pendukung. Hal ini tentu belum sesuai dengan Permendagri No.122 Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur di UPT Pemadam Kebakaran Kota Dumai dilihat dari observasi para personil menjalankan tugas sesuai prosedur yang ada dilapangan dan menggunakan APD sesuai dengan pekerjaan nya,

Sistem Pemadaman di UPT Pemadam Kebakaran dilihat dari observasi para personil pemadam sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai prosedur yang berlaku, tetapi masih mengalami kendala yaitu respond time yang belum terpenuhi.

Sistem Penyelamatan di UPT Pemadam Kebakaran dilihat dari observasi para personil pemadam sudah menjalankan tugasnya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan serta mengevakuasi korban kebakaran, tetapi belum memiliki regu penyelamatan dan tim medis tersendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penelitian ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, saran, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Welly Sando, SP, MKM selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, memberikan ilmu dan pengarahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Asril, SKM, M.KKK selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, memberikan ilmu dan pengarahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Arief Wahyudi, SE, M.Kes selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini.
4. Bapak M. Dedi Widodo, SKM, M.Kes selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran yang membangun dalam penelitian ini.
5. Bapak Kepala UPT Pemadam Kebakaran Tipe A Kota Dumai yang telah memberikan izin, dan banyak memberikan bantuan kepada peneliti baik waktu serta informasi dalam wawancara penelitian ini.
6. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta serta keluarga besar yang telah mendoakan agar selama penelitian ini diberi kelancaran dan kemudahan serta memberikan semangat agar dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baariq Yazid, M. (2022). Peran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dalam Menanggulangi Dan Pencegahan Kebakaran Bangunan Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Brushlinsky, N., Sokolov, S., Wagner, P., & Messerschmidt, B. (2022). Center for Fire Statistics. Internasional Association Of Fire And Rescue Services, 27.

- Fatmawaty, M., Dwi, D. S., & Nurul, F. (2017). Gambaran Perilaku Tenaga Kerja Dan Pelaksa-Naan Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi Dalam Pembangunan Balai Diklat Bpk-Ri Makassar Oleh Pt. Wijaya Karya (Persero) Tbk. *Al-Sihah Public Health Science Journal*, 9(1), 72–84.
- Hidayat, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran.
- Muthmainnah, S. (2021). Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Pemukiman Di Kota Langsa Provinsi Aceh.
- Pakpahan, E. S. (2014). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(1), 116–121.
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kelas A, (2018).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan , (2009).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah, (2009).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, (2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah, (2018).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), (1980).
- Putra, I. W. K. E., & Astawa, I. G. P. B. (2022). Pemetaan Kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. *ENMAP*, 3(2).
- S, R. A., Cahyono, D., & Aulin, G. (2020). Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. 4(1), 116–122.
- Standar Nasional Indonesia, SNI 09-7053-2004 Tentang Kendaraan Dan Peralatan Pemadam Kebakaran, (2004).
- Statistik Indoneisa 2022. (2022). Badan Pusat Statistik. Dalam Badan Pusat Statistik.
- UPT Damkar Kota Dumai. (2021). Usulan Sub Urusan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kota Dumai Menjadi Dinas Mandiri .
- Veithzal Rivai Zainal. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan (7 ed.). PT RAJAGRAFINDO.
- Wahyudi, M. R. (2022). Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Mempawah.
- Widayanto, P. (2016). Analisis Kinerja Tim Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran Di Dinas Kebakaran Kota Semarang.
- Zahara Raudia. (2022). Pengaruh Teamwork Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Di Kecamatan Kota Balingka Kabupaten Pasaman Barat). Skripsi.